

Peran Gerakan Perempuan Mahardhika Dalam Melawan Diskriminasi Dari Budaya Menindas dan Kemiskinan

Astin Julia Rosa¹, Dewi Septiani², Faesal Mubarak³, Mutiara Safina⁴, Vivih Ashfia Haq⁵

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan astinjr@upnvj.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan dewis@upnvj.ac.id

³Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan faesalm@upnvj.ac.id

⁴Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan mutiaras@upnvj.ac.id

⁵Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan vivihah@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Negara hukum secara konstitusional menjamin segala bentuk perlindungan, keamanan, hak hidup, hak pendidikan, hak politik dan segala bentuk hak yang diakui sebagai hak asasi manusia. Namun, pada tatanan sosial yang ada, seringkali hak-hak yang diakui mengalami defisit pengakuan dan kurangnya memperoleh jaminan yang aktual. Perempuan Mahardhika hadir sebagai gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak yang harus didapatkan khususnya pada perempuan. Penelitian ini untuk melihat peran gerakan Perempuan Mahardhika dalam mengaktualisasi visi melawan diskriminasi dan budaya menindas terhadap perempuan. Metode penelitian yang dilakukan melalui metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Dengan mengamati organisasi Perempuan Mahardhika, dihasilkan bahwa dalam pergerakannya, Perempuan Mahardhika terus menghadirkan konsolidasi secara *top and down*, menekan pemerintah mendorong kebijakan yang tidak bias gender dan memberdayakan perempuan melalui pengadaan pendidikan politik. Hal ini menjadi bentuk perlawanan atas realitas sosial yang seringkali terdiskriminasi dan kurang memperoleh jaminan yang nyata.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Gerakan Sosial, Diskriminasi, Kesetaraan Gender.

ABSTRACT

The rule of law constitutionally guarantees all forms of protection, security, the right to life, the right to education, political rights and all forms of rights that are recognized as human rights. However, in the existing social order, the recognized rights often experience a deficit of recognition and a lack of actual guarantees. Perempuan Mahardhika exists as a social movement that fights for rights that must be obtained, especially for women. This research is to look at the role of the Perempuan Mahardhika's movement in actualizing the vision against discrimination and an oppressive culture against women. The research method was carried out through qualitative methods with descriptive analysis. By observing the Perempuan Mahardhika's organization, it was found that in their movement, Perempuan Mahardhika continued to present consolidation on a top and down basis, pressing the government to push for policies that were not gender biased and empowering women through the provision of political education. This is a form of resistance to social reality which is often discriminated against and lacks real guarantees.

Keywords: Human Rights, Social Movements, Discrimination, Gender Equality.

PENDAHULUAN

Konstruksi yang membentuk perempuan sangat diadopsi dari kehidupan masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai sebuah gender yang berbeda dengan laki-laki. Hal ini membuat perempuan adalah sebagai takdir yang terbentuk di masyarakat bahwa perempuan tidak memiliki kebebasan yang sama dengan yang dimiliki laki-laki. Fungsi-fungsi yang terjalin di sosial masyarakat membuat perempuan hanya di generalisir mempunyai peran serta kewajiban yang hanya dimiliki perempuan. Posisi perempuan yang lebih rendah di kehidupan masyarakat menjadikan laki-laki lebih superior akibat dari adanya konstruksi tersebut. Dengan konstruksi yang dibentuk tersebut membuat perempuan mempunyai kodrat hanya hamil, melahirkan, dan menyusui.

Dalam perspektif gender juga disini perempuan dilihat belum mempunyai kesetaraan untuk penguatan posisinya. Norma yang terbentuk dalam masyarakat menjadikan perempuan cukup lemah kedudukannya jika dibandingkan dengan laki-laki. Disamping itu, perempuan juga turut dan seringkali mendapatkan ketidakadilan dalam perlakuannya di kehidupan bermasyarakat. Konstruksi sosial yang dibentuk untuk perempuan dinilai tidak dapat diubah dan tidak dapat ditukarkan dari gender lainnya. Konstruksi sosial ini menjadikan perempuan hanya dapat bergerak pada lingkup sosial yang dapat membuatnya nyaman. Namun, hal ini tidak menggeneralisir seluruh perempuan hanya bergerak pada lingkup sosial yang membuatnya nyaman.

Disiplin ilmu mengenai perempuan kian lama semakin berkembang akibat dari adanya keinginan perempuan untuk memajukan pribadinya dan juga untuk mematahkan apa yang menjadi kodratnya. Pada tahap ini kodrat perempuan diperluas lagi dan perlahan menemukan titik keadilan dan juga kesetaraannya dalam masyarakat, terlebih dengan munculnya perspektif feminisme. Feminisme adalah sebuah paham yang terdiri dari gerakan para perempuan yang ingin membebaskan dirinya untuk mendapatkan tatanan hidup yang adil dan manusiawi.

Disamping itu, gerakan feminisme ini juga diadopsi dari pemahaman Galtung yang berupaya untuk menumbuhkan gerakan kaum feminis. Dimana dalam konsep ini Galtung menekankan pada kedamaian dan juga meminimalisir kekerasan, kontribusi Galtung disini adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan kekerasan yang menimpa para perempuan. Dengan begitu dengan pemahaman ini diharapkan gerakan kaum feminis dapat memberikan sebuah perubahan dalam keadaan untuk memajukan kaum perempuan (Galtung, 2017).

Dengan adanya sebuah manifestasi dari konstruksi masyarakat mengenai jenis kelamin perempuan menegaskan mengenai adanya subordinasi yang terjalin di masyarakat, dimana perempuan dinomorduakan akibat dari adanya jenis kelamin yang berkuasa. Sehingga, dalam memperoleh akses-akses yang tersedia di masyarakat perempuan cukup yang lebih luas seperti politik (Mursidah, 2013). Pengaruh dalam hal stereotip juga menjadi hal yang masih erat kaitannya dengan perempuan hanyalah kaum yang tugas dan fungsinya hanya dalam lingkup pekerjaan domestik dan lingkup rumah tangga saja. Pelabelan negatif ini menjadikan perempuan tidak dapat menunjukkan taringnya untuk memberantas label "Ibu Rumah Tangga".

Pada segelintir diskriminasi yang ditujukan untuk perempuan membuat sebuah alasan baru dengan munculnya gerakan feminis. Disamping itu, dengan berbagai gerakan yang dilatarbelakangi oleh feminisme ini memicu lahirnya gerakan-gerakan perempuan lainnya, seperti halnya Perempuan Mahardhika. Gerakan perempuan ini pada awalnya lebih menitikberatkan pada keinginan kelompok perempuan untuk membebaskan diri dari belenggu konstruksi sosial yang membentuk makna perempuan dikotak-kotakkan. Selain itu, gerakan ini juga berfokus pada perjuangan bersama untuk melibatkan perempuan pada sektor publik dan juga bidang lainnya yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh perempuan akibat dari pengkotak-kotakan fungsi dan peran dari jenis kelamin.

Disisi lain, permasalahan perempuan sering kali dikaitkan dengan isu budaya kemiskinan dan juga penindasan. Akan tetapi budaya atau karakteristik tidak selalu terjadi karena adanya konsep sentralistik yang membuat seluruh budaya berpusat dalam satu karakter atau budaya yang berkembang di masyarakat. Melainkan karakteristik atau budaya muncul karena adanya pertumbuhan serta perkembangan suatu kebiasaan yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang berkembang di suatu wilayah di Indonesia. Sehingga budaya kemiskinan dimaksudkan sebagai

sebuah isu sosial mengenai kemiskinan di dalam struktur kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan cenderung berkaitan erat dengan kondisi perekonomian setiap individu, maka sulit untuk memecahkan permasalahan mengenai kemiskinan ini (Wiratmoko, 2014).

Terbentuknya gerakan Perempuan Mahardhika ini juga turut memberantas persoalan gender yang masih marak terjadi akibat dari faktor sosial budaya masyarakat. Jika gender diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan porsi dan fungsi kedudukan antara laki-laki dan perempuan, maka Perempuan Mahardhika disini hadir untuk memendam pengertian tersebut (Apriani, 2015). Perempuan Mahardhika sejatinya muncul ditengah-tengah permasalahan yang menerjang kehidupan perempuan yang saat ini menjadi subjek gender yang tidak merasakan keadilan dibandingkan dengan kehidupan gender yang lainnya.

Peran nasionalisme tidak memihak hanya kepada satu gender saja namun nasionalisme bersifat menyeluruh yang dimaksudkan jika nasionalisme dapat dipahami dan dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Nasionalisme sendiri muncul ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik dan multikulturalisme. Keragaman budaya dan juga kebiasaan membutuhkan sebuah pemahaman mengenai perbedaan-perbedaan tersebut karena jika tidak adanya sikap menghargai antara masyarakat akan membuat sebuah kehancuran bangsa. Sehingga nasionalisme dalam hal ini sangat berpengaruh penting terhadap persatuan bangsa (Udasromo, 2004).

Hubungan yang terbentuk antara kelompok Perempuan Mahardhika dengan nasionalisme serta multikulturalisme merupakan satu kesatuan yang tidak dapat teruraikan. Hal tersebut disebabkan pengakuan perempuan sebagai gender masih kurang diakui oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian peran perempuan Mahardhika dalam hal ini menjunjung tinggi harkat dan martabat yang dimiliki oleh seorang perempuan. Kelompok perempuan Mahardhika berpegang erat terhadap kesatuan bangsa Indonesia yang menjunjung keragaman budaya dan juga ada kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, konsep kelompok perempuan Mahardhika berperan dalam melawan segala bentuk kasus diskriminasi yang berbentuk penindasan dan juga kemiskinan yang dirasakan oleh perempuan. Maka dari itu tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai peran gerakan perempuan Mahardhika dalam melawan diskriminasi dari budaya menindas dan kemiskinan yang dikaitkan dengan konsep nasionalisme multikulturalisme dan politik identitas yang ada di Indonesia.

LANDASAN TEORI

A. Feminisme Sosialis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan salah satu teori yang dianggap relevan dengan masalah penelitian, yaitu teori feminisme sosialis. Feminisme sosialis menekankan pada aspek gender dan ekonomis dalam eksploitasi kelompok perempuan. Pandangan Marx dalam hal ini perempuan diposisikan sebagai penghuni kelas ekonomi, dan "kelas seks", sebagaimana yang disebut oleh Shulamith Firestone. Dengan demikian, perempuan merupakan pelayan terbaik bagi kapitalisme dan juga baik sebagai pekerja maupun istri yang tidak menerima upah atas kerja domestik mereka (Sjahrir, 1982, h. 91). Dalam pandangan teori feminisme sosialis perempuan ditindas oleh dua kelompok yaitu patriarki dan kapitalis.

Feminisme sosialis merupakan kritik terhadap feminisme Marxis. Menurut Jagger di dalam Launer, pemahaman ini merupakan skema secara historis-materialis dari Engels yang

menyatakan "The Personal Is Political" dari kelompok feminis radikal (Fakih, 1995, h. 234). Pemahaman feminisme sosialis menyatakan bahwa patriarki telah ada sebelum kapitalisme menyerang dan mendominasi perempuan, sehingga kritik kapitalisme perlu diseimbangkan dengan kritis dominasi atas perempuan (Ihromi, 1995, h. 86)

Feminis sosialis menyatakan bahwa kehadiran kapitalisme dan patriarki menyebabkan adanya subordinasi terhadap kelompok perempuan. Dalam tulisannya Rosemary (1998) mengatakan bahwa hal ini bisa dijelaskan secara teoritis, dengan mengembangkan perspektif teori sistem ganda dan teori sistem menyatu. Teori sistem ganda memandang penindasan terhadap perempuan disebabkan oleh dua ideologi berbeda yaitu kapitalisme dan patriarkisme. Sementara dalam pandangan teori sistem menyatu adalah gabungan dari beberapa konsep terkait apa yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap kelompok perempuan di masyarakat.

Akar pada teori feminisme sosialis bertumpu kepada tuntutan keadilan dari kelas borjuis yang memiliki modal untuk tidak membedakan pemberian upah, kesempatan cuti kerja, dan lainnya yang bias gender. Isu feminisme sosialis memiliki satu isu sentral yaitu mengenai hubungan antara kerja domestik dengan kerja upahan atau dalam perspektif psikologi kesetaraan antara keluarga dan kerja (Agger, 2003, h. 229-230). Beberapa hal yang menjadi inti dari pemikiran feminisme sosialis, diantaranya:

1. Wanita tidak menjadi bagian dalam analisis kelas, karena wanita tidak memiliki hubungan tertentu dengan alat-alat produksi.
2. Gagasan untuk membayar wanita atas pekerjaan yang dilakukan di rumah. Memegang status sebagai IRT sangat memberikan keuntungan bagi berjalannya sistem kapitalis.
3. Kapitalisme berkaitan dengan sexism, karena memisahkan antara pekerjaan yang memiliki upah dengan pekerjaan domestik, sehingga banyak wanita yang didesak untuk melakukan pekerjaan domestiknya.

Feminisme sosialis menyatakan bahwa penindasan secara kultural terjadi atas dua hal, yaitu penindasan di bawah kapitalis dan penindasan di bawah patriarkisme yang kemudian menjadi disebut dominasi (Ritzer & Goodman, 2007, h. 415). Inti dari gerakan feminis sosialis adalah gerakan untuk membebaskan kelompok perempuan dalam melawan struktur patriarki. Termasuk dalam hal perubahan struktur patriarki yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender.

Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami subordinasi kelompok perempuan. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Nancy Fraser di Amerika Serikat keluarga inti adalah individu yang berjenis kelamin laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara karena peran masyarakat dan pekerja adalah peran yang bersifat maskulin, sedangkan peran konsumen dan pengasuh adalah feminin. Asumsi ini yang menjadi dasar oleh kelompok feminisme sosialis yang menyatakan bahwa kapitalis bukan satu dari penyebab adanya keterbelakangan perempuan dalam struktur sosial. Faktor gender, kelas, ras, dan individu itu sendiri juga bisa menjadi penyebab subordinasi dari kelompok perempuan (Tong, 1998, h. 21).

Pada penjelasan feminisme sosialis bahwa perempuan mempunyai dua beban, diantaranya di wilayah rumah untuk mengurus keluarga dan harus bekerja. Beban kerja perempuan lebih berat dibandingkan dengan laki-laki jika dikorelasikan dengan beban kerja domestik. Karena kebanyakan akar dari budaya patriarkisme menganggap bahwa laki-laki tidak perlu mengerjakan pekerjaan domestik.

B. Standpoint Theory

Standpoint theory atau teori sudut pandang merupakan sebuah teori kritis karya Sandra Harding dan Patricia Hill Collins. Teori ini kemudian dikembangkan dengan mengkaji bagaimana keadaan seseorang mempengaruhi aktivitas individu dalam memahami dan membentuk dunia sosialnya (Littlejohn & Foss, 2008, h. 135). Menurut pemikiran Hartsock (1983) kaitan antara teori sudut pandang dengan isu feminisme, mengemukakan bahwa pengalaman, pengetahuan dan perilaku komunikasi terbentuk dalam sebagian besar kelompok sosial darimana mereka berasal. Teori *standpoint* menjelaskan kajian kritis mengenai *status quo* dikarenakan struktur kekuasaan yang lebih mendominasi (West & Turner, 2010, h. 502).

Teori *standpoint* memberikan pemahaman mengenai sistem kekuasaan oleh karenanya sangat relevan dalam memahami subordinasi yang dialami oleh kelompok perempuan. kerangka ini dibangun berdasarkan pengalaman keseharian setiap individu. Setiap orang merupakan konsumen aktif dan setiap individu itu merupakan informan penting mengenai pengalaman mereka. Oleh karenanya menurut Griffin (2006) perspektif dari mereka yang kurang berkuasa akan lebih objektif daripada mereka yang memiliki kekuasaan.

Teori *standpoint* yang diutarakan oleh Hartsock terdapat lima asumsi mengenai kehidupan sosial, yaitu (West & Turner, 2010, h. 505):

1. *Material life*, kedudukan kelas akan membangun dan memberikan batasan pemahaman mengenai relasi sosial.
2. Pandangan kelompok yang berkuasa akan membentuk sebuah hubungan dimana semua individu ditekankan untuk berpartisipasi.
3. Pandangan kelompok minoritas merepresentasikan perjuangan.
4. Pemahaman kelompok tertindas tentang ketidakadilan dalam hubungan antarkelompok mengarah kepada "*a better world*".
5. Mereka yang menempati kedudukan berbeda dalam hierarki sosial.

Dari kelima asumsi tersebut mengungkapkannya bahwa kehidupan material yang membatasi hubungan sosial, mengalami perubahan struktur dalam dua cara yang berlawanan. Ketika terdapat kelompok dominan dan kelompok minoritas, maka pemahaman kelompok yang lebih dominan akan bersifat parsial dan merugikan. Sama halnya jika dikaitkan dengan struktur sosial patriarkisme, perempuan sebagai kelompok minoritas akan mengalami situasi yang tidak menguntungkan karena laki-laki lebih berperan secara dominan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan kajian teori *standpoint* dapat kita lihat mengenai adanya pandangan bahwa kaum laki-laki mendominasi kehidupan masyarakat hal ini dipengaruhi oleh patriarki dan ideologi tertentu. Kondisi struktur patriarki yang sangat kental mempengaruhi peranan perempuan yang menjadi kelompok kelas kedua. Segala aktivitas dan kebijakan selalu berpandangan dari sudut pandang laki-laki. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori feminisme sosialis dan teori *standpoint* sebagai analisa data, teori ini relevan untuk menjelaskan peran perempuan Mahardhika sebagai kelompok penggerak perempuan dalam melawan diskriminasi baik di lingkungan kerja maupun beban domestiknya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Melalui metode ini, peneliti berusaha memusatkan pandangan pada masalah-masalah

yang bersifat aktual, kemudian menyusun fakta-fakta yang di dapat dengan interpretasi yang rasional dan tepat (Nawawi, 2004). Analisis data juga dilakukan dengan mengelaborasi fakta empirik dengan literatur pendukung seperti, jurnal, buku, dan sumber terpercaya yang akan menguatkan interpretasi lebih lanjut. Teknik pengumpulan data sendiri dilakukan dengan serangkaian observasi dan dokumentasi. Melalui teknik tersebut, memilah data akan lebih sistematis dan diperkuat melalui penjabaran konsep dan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perempuan Mahardhika dan Nasionalisme Perempuan

Perempuan Mahardhika diinisiasi akibat dari terbentuknya organisasi kerakyatan pasca 1998 yang saat itu sedang marak hadir di tengah-tengah masyarakat. Perempuan Mahardhika hadir ditengah-tengah masyarakat karena pada saat itu belum ada upaya terkait wadah yang dapat menyuarakan isu-isu kesetaraan perempuan dan juga akomodasi yang dapat menjadi panduan para perempuan yang mengalami persoalan-persoalan pelecehan perempuan. Salah satu inisiator dari berdirinya Perempuan Mahardhika, yaitu Vivi Widyawati menyuarakan suaranya "Bangun! Organisasi dan Pergerakan Perempuan harus terbentuk untuk melawan patriarki, militerisme dan kapitalisme!".(Kusuma, 2016)

Disamping itu, Perempuan Mahardhika terbentuk untuk memberantas buta huruf yang dialami oleh perempuan-perempuan lainnya. Dimana perempuan disini mempunyai persoalan terkait minimnya literasi dan juga pendidikan politik. Sehingga, banyak dari perempuan Indonesia yang tidak paham akan pendidikan politik yang sedang bekerja disini. Misalnya, kaitannya dengan perempuan yang kerap kali diperbudak oleh para tuan tanah dan disini buruh perempuan tidak mendapatkan haknya terkait upah yang layak. Hal ini adalah bentuk dari penyadaran politik perempuan. Perempuan Mahardhika terbentuk untuk pemberantasan buta huruf, hal ini yang menjadikan pendidikan politik perempuan mendapatkan kontradiksi-kontradiksi politik yang terjadi di masyarakat. Selain itu, kontradiksi yang terjadi di setiap wilayah selalu berbeda antara yang terjadi di desa dan kota. Jika di desa, kontradiksi yang terjadi adalah tentang buruh, kelangkaan tanah, tuan tanah, dan upah yang rendah. Permasalahan ini yang menjadi topik pendidikan politik perempuan yang tidak lepas dari buta huruf. Maka Perempuan Mahardhika hadir untuk memberantas hal itu.

Perempuan Mahardhika juga hadir untuk memberantas segala isu yang terjadi pada perempuan, baik itu minimnya kesetaraan gender, maupun hak-hak wajib yang tidak diterima oleh perempuan. Pelecehan seksual yang dialami perempuan sudah menjadi isu umum yang tidak ada penyelesaiannya, sehingga Perempuan Mahardhika disini hadir untuk memberantas dari isu pelecehan yang kerap kali terjadi dan dialami oleh perempuan. Banyaknya diskursus dan persoalan buruh perempuan dan kesetaraan hak pekerja semakin meningkat seiring berjalanya waktu banyak dari mereka yang belum mendapatkan keadilan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Sehingga, hadirnya Perempuan Mahardhika sangat membantu para buruh perempuan yang membutuhkan pendampingan dalam melakukan advokasi terkait kasus yang menimpa para korban.

Sementara itu, berbicara mengenai gerakan perempuan tak terlepas oleh pengaruh nilai nasionalisme yang ada sejak dulu. Dimana bahwa entitas gerakan perempuan tidak selalu mengenai pergerakan nasional kaum laki-laki tetapi ada peran perempuan yang mau ikut serta dan berkontribusi dalam perjuangan nasional bangsa, adanya semangat nasionalisme yang muncul dan

berkembang memiliki pengaruh yang besar bagi perempuan Indonesia di masa sebelum kemerdekaan (Rianti, 2022).

Melihat dalam pandangan teoritis terdahulu bahwa teoritis feminis memandang dan mengartikan konsep nasionalisme mereka sebagai bentuk semangat cinta kebangsaan yang erat dengan persoalan konstruksi, produksi dan reproduksi serta merta relasi keterhubungan gender di dalamnya. Konteks nasionalisme tersebut dimaknai sebagai reaksi dan pandangan kritik terhadap teori nasionalisme pada era awal seperti teori anderson dan gellner yang meniscayakan dan menafikan tidak adanya hubungan gender dalam nasionalisme. Sejak dulu memang kehadiran dan peran perempuan selalu dinafikan dan dilokalisasi dalam sektor privat nyata nya bahwa peran perempuan lah yang menjadi aktor penting dalam hal pengkonstruksian nasionalisme. Yang mana dari latar belakang tersebut mengimplikasikan bahwa perempuan dalam kewarganegaraannya memiliki peran dualitas, di satu sisi negara dan pemerintah selalu mengintegrasikan perempuan dalam keseluruhan aspek politik secara Nasional. Namun disisi lainnya, mulai hadirnya kebijakan yang memosisikan hal terpisah dalam prinsip-prinsip egalitas perempuan (Ugasromo, 2004).

Alhasil sejarah telah menerangkan bahwa konsep ini yang seringkali memperlihatkan realitas nya bahwa peran perempuan selalu disandingkan dengan entitas kebijakan dan hak yang mendoktrinasi egalitas dan peran perempuan itu berbeda, tak jauh berbeda hal inilah yang mengakar bahwa konsep dan nilai kebangsaan kerap kali diatasnamakan kepentingan perempuan kendati yang terjadi adalah kehadiran peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang justru membuat diskriminatif terhadap perempuan dengan mengatasnamakan moralitas dan agamis yang ironis karena proses dan penyusunan didukung oleh partai-partai nasionalis. Oleh karena nya, fenomena dan realitas ini tidak hanya menyertai pengaruh yang dapat mengintimidasi kehidupan perempuan dan kelompok marginal saja namun serta merta mengimplikasi konsensus nasionalisme kebangsaan dan kehidupan berdemokrasi (Dhewy, Jurnal Perempuan).

B. Gerakan Perempuan Mahardhika dalam Melawan Kekerasan, diskriminasi budaya dan kemiskinan

Maraknya kasus isu perempuan dalam berbagai aspek kehidupan mengikutsertakan masyarakat untuk menyadari pentingnya kesadaran gender. Kesadaran gender dianggap sebagai instrumen fundamental dalam segala sektor tak terkecuali dalam ranah pekerjaan yang layak bagi laki-laki maupun perempuan. Dimana kesetaraan akan gender ini merujuk pada kesamaan hak-hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang harus dimiliki setiap orang terlepas dari jenis kelamin seseorang itu. Namun dalam kenyataannya, masih ada kasus pekerja perempuan yang mengalami kekerasan seksual dimana hal ini terlihat dalam potret buruh perempuan di KBN Cakung. Dimana bahwasanya bukan hal tabu lagi keberadaan perempuan memiliki peran penting bagi keberlanjutan bisnis sebuah garmen atau pabrik. Oleh karena itu, setidaknya ada 80% tenaga kerja didominasi oleh perempuan. Sehingga tak jarang hal ini banyak memunculkan penindasan perempuan yang terjadi di sektor industri seperti garmen tersebut.

Menurut kajian Perempuan Mahardhika, gerakan ini berhasil mengkaji dan mengurai pengalaman dari 773 buruh perempuan dari tenaga kerja perempuan yang bekerja di KBN Cakung, terkait dengan hal-hal yang dirasakan dan didapatkan para buruh perempuan ketika bekerja. Para buruh garmen perempuan tersebut bekerja di 38 perusahaan garmen yang secara resmi beroperasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Timur. Dimana sebanyak 56,5% dari 773 buruh perempuan yang bekerja di 38 perusahaan garmen tersebut pernah mengalami pelecehan

seksual di pabrik. Pelecehan seksual yang terjadi pada buruh perempuan ini rata-rata dilakukan oleh para mekanik, pekerja di bidang HRD, satpam bahkan tukang parkir. (Rufaidah, 2020)

Gerakan Mahardhika akan terus berupaya membantu korban dan bisa terus mengkonsolidasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap pekerja-pekerja perempuan yang membutuhkan pendampingan dan perantara penyelesaian kasus pekerja perempuan. Sementara itu organisasi gerakan perempuan Mahardhika mencatat bahwa esensi dari substansi Undang-undang Cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR November 2020 lalu, tidak dapat mewujudkan perlindungan yang nyata terhadap buruh-buruh perempuan yang mengalami kekerasan fisik di lingkungan internalnya. Sependapat dengan hal tersebut banyak korelasi mengenai pokok permasalahan perempuan yang berkenaan dengan diskriminasi berbasis gender, adanya *sexual harrasment* dan KDRT yang sangat krusial dihadapi oleh para pekerja perempuan. Kendati begitu, adanya peraturan perundang-undangan Cipta Kerja yang ditujukan untuk urgensi solutif terhadap para pekerja terutama pekerja perempuan namun seolah-olah menafikan gender atau tidak menopang kepentingan-kepentingan perempuan. Dimana hal ini terlihat adanya buruh perempuan yang mengalami diskursus kekerasan dan harus melapor namun presensi perusahaan seakan tidak peduli dan menganggap ketidakhadiran pekerja tersebut. Oleh sebab itu, keberadaan undang-undang Cipta kerja ini memicu hal untuk memiskinkan dan memarjinalkan perempuan dalam akses pekerjaan. (Rizal, 2021)

Untuk itu dalam melawan kekerasan dan budaya diskriminasi terhadap perempuan, Perempuan Mahardhika melakukan berbagai upaya untuk mengajak semua perempuan untuk memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai persoalan dan ketidaksetaraan perempuan dengan mau ikut bertumbuh dan bergerak bersama untuk bisa mengerti kompleksitas permasalahan dari ketimpangan dan kesenjangan permasalahan perempuan. Gerakan nyata Perempuan Mahardhika seringkali dilakukan dengan membuat pelatihan atau sosialisasi kepada perempuan, salah satunya adalah pelatihan dasar buruh perempuan anggota Perempuan Mahardhika yang telah diselenggarakan di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Hingga saat ini ketidakberdayaan dalam membela hak-hak sebagai jati diri perempuan berhubungan erat dengan berbagai bentuk kekerasan, dalam pelatihan yang dibersamai dengan para buruh perempuan tersebut membagikan cerita pahit pengalaman yang sering dialami oleh para buruh perempuan dengan begitu mereka membahas dan mendiskusikan solusi apa yang dapat membenahi diskursus tersebut, alhasil dari berbagai kemungkinan dari solusi tersebut mendorong kesadaran untuk perubahan yang lebih baik. Karena pada hakikat yang perlu ditekankan adalah bahwa perilaku tindak kekerasan tidak boleh terjadi dan tidak semestinya dilakukan kepada orang lain terutama perempuan karena perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memiliki kehidupan yang aman, adil dan terbebas dari segala macam bentuk kekerasan.

C. Pengaruh Kehadiran Perempuan Mahardhika di tengah Pusaran Identitas Perempuan dan Konflik

Konsep mengenai pengakuan budaya dan etnis maupun ras yang berbeda di masyarakat merupakan isu utama terkait multikulturalisme. Setidaknya multikulturalisme bisa memandang perbedaan bahkan perbedaan merupakan pengakuan terhadap keanekaragaman hal ini ditujukan agar masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan adil.

Perempuan Mahardhika hadir disebabkan permasalahan-permasalahan yang hadir ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara

dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang membuat Indonesia dikenal dengan sebutan negara multikulturalisme. Adanya anggapan tersebut tidak terlepas dari keberadaan perempuan dan laki-laki di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Terdapat pendapat yang berkembang di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yang mengatakan bahwa kedudukan tertinggi dalam hierarki gender dikuasai oleh laki-laki yang membuat pandangan yang lebih rendah kepada kaum perempuan yang dianggap tidak memiliki kuasa dalam apapun. Sehingga dalam tatanan kehidupan bermasyarakat lebih dinominasikan oleh kaum laki-laki, sedangkan perempuan tidak berkuasa dalam menentukan pilihan maupun keputusan yang seharusnya memang memerlukan hak dan pendapat dari laki-laki dan juga kaum perempuan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Organisasi Perempuan Mahardhika masih banyaknya para pekerja perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) walaupun regulasi Undang-undang Perlindungan KDRT telah ditetapkan sejak 18 tahun yang lalu. Salah satu informan dari Organisasi Perempuan Mahardhika yaitu Vivi Widyawati menyatakan bahwa pelaku KDRT terhadap pekerja perempuan ini bukan hanya berasal dari segi domestik, melainkan ada beberapa pelaku yang merupakan mantan suami yang masih satu tempat kerja dengan korban. Menurutnya KDRT pada buruh perempuan ini dapat mengurangi produktivitas para pekerja perempuan yang akan merasakan gangguan secara psikologis seperti (cemas, tidak tenang, dan juga merasa terancam).

Karena kasus tersebut Organisasi Perempuan Mahardhika mencoba memberikan pemahaman kepada para pekerja perempuan mengenai UU PKDRT kepada masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau sadar terkait peraturan tersebut. Sehingga Perempuan Mahardhika mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi UU PKDRT secara masif kepada masyarakat di daerah tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun hierarki sosial. Hal ini ditujukan sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan perempuan dari KDRT. Perempuan Mahardhika juga menganjurkan untuk memberikan fungsi aktif dari pemerintah kepada tingkat RT/RW karena dari tingkat inilah yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Oleh karena itu, penyebab permasalahan pada kaum perempuan yang tertindas dan miskin membuat gugahan bagi organisasi perempuan Mahardhika untuk memperjuangkan segala bentuk aksi dan juga aktivitas yang mendukung keberadaan kaum perempuan di mata publik sehingga tidak adanya dominasi diantara kaum laki-laki saja dalam melakukan segala bentuk keputusan dan juga pendapat. Hal tersebut disebabkan jika perempuan hanya boleh melakukan aktivitasnya secara terbatas berbanding terbalik dengan kaum pria yang dapat melakukan aktivitas dan ditempatkan di ranah publik secara bebas (Mulia, 2005, h.4). Kemudian perempuan Mahardhika hadir disaat perempuan mendapatkan perlakuan yang lebih kasar dibandingkan dengan laki-laki yang lebih diunggulkan. Maka organisasi perempuan Mahardhika bertujuan untuk meningkatkan derajat dan martabat bagi kaum perempuan yang ada di Indonesia, sehingga tidak lagi merasa tertindas oleh kaum tertentu.

Organisasi perempuan Mahardhika melakukan keberadaannya sebagai sebuah kelompok organisasi yang memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap perjuangan dan ikut serta secara aktif dalam segala bentuk aktivitas dan aksi penindasan serta aksi eksploitasi terhadap perempuan. Lalu Organisasi Perempuan Mahardhika juga memiliki sejumlah fokus untuk melakukan perwujudan keadilan serta kesejahteraan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Hal tersebut menyebabkan kehadiran Organisasi Perempuan Mahardhika memiliki pengaruh yang sangat besar

terhadap eksistensi kaum perempuan di dalam Indonesia. Kemudian, pada keberadaan Organisasi Perempuan Mahardhika berfokus juga terhadap isu-isu yang berkaitan dengan isu buruh perempuan, isu kekerasan seksual, isu orientasi gender dan seksualitas, serta isu-isu mengenai perempuan dan juga politik. Dengan demikian pengaruh keberadaan Organisasi Perempuan Mahardhika berperan penting terhadap akses perempuan yang lebih seimbang dibanding sebelumnya bahwa kaum perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah berbanding kaum laki-laki yang lebih dominan di Indonesia. (Rahmat, 2014)

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan menjadi beberapa poin. Pertama, diskriminasi terhadap kelompok perempuan seringkali dianggap hal yang biasa bahkan dianggap tidak ada, tersembunyi, dan dikemas rapi oleh struktur sosial yang diselimuti oleh kegelapan patriarki. Sehingga banyak sekali masyarakat yang abai terhadap urgensi diskriminasi kelompok perempuan. Banyak dari kelompok perempuan mengalami kesulitan dalam penyelesaian kasus mereka ketika mengalami kejadian diskriminasi. Disamping itu belum adanya payung hukum yang memadai, namun setelah disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada kesempatan dan peluang bagi perempuan untuk menangani kasus diskriminasi yang dialaminya. Sehingga diskriminasi terhadap kelompok perempuan sekarang bisa menjadi kasus pidana. Perihal ini juga menjadi dorongan bagi gerakan Perempuan Mahardhika untuk terus melakukan konsolidasi secara *top and down*, terus menekan pemerintah agar kebijakan yang diberlakukan tidak bias gender, dan melakukan pendidikan politik dalam memberdayakan kaum perempuan.

Pelecehan seksual yang kerap menekan dan mendiskriminasi kelompok perempuan terus mendorong organisasi perempuan Mahardhika dalam merespons realitas sosial. Kami memberikan beberapa saran yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak, diantaranya:

1. Perempuan Mahardhika sebagai organisasi yang fokusnya terhadap pergerakan perempuan bisa terus mendesak dan melakukan konsolidasi berkala dalam pendidikan pemberdayaan perempuan serta memberikan pendidikan terhadap pengimplementasian undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dapat terus mengevaluasi penerapan UU TPKS sebagai payung hukum bagi kelompok perempuan yang mengalami diskriminasi akibat struktur patriarkisme di Indonesia. Serta terus mendorong kebijakan yang tidak bias gender.

REFERENSI

- Littlejohn, & Foss. (2008). *Teori Komunikasi : Edisi 9* (Penerjemah: Mohammad Yusuf Hamdan ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Agger, B. (2003). *Teori Sosial Kritis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rahmat, A. (2014) . *Civil Society dan Pembangunan*. Jakarta: Hibah Buku Ajar Universitas Negeri Jakarta, hlm. 93.
- Nawawi, H. & Hadari, M. (2004). *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dhewy, A. *Perempuan dan Kebangsaan*. Catatan Jurnal Perempuan
- Fakih, M. (1995). *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ihromi, T. O. (1995). *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusuma, R. E. (2016). *Gerakan Politik Perempuan: Ormas Perempuan Mahardhika*.

- Mulia, S. M. (2005). *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Perempuan Mahardhika. (2022). *Kuat bersama Untuk Berkemajuan*
- Rianti, R. (2022, March 27). *Perempuan Masa Pergerakan Nasional | kumparan..* Kumparan. Retrieved December 9, 2022, from <https://kumparan.com/rita-rianti/perempuan-masa-pergerakan-nasional-1xIW3PHkIJa>
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rizal, M., & Rhahima, D. F. (2021). *The Influence Of The Job Creation Act (Omnibus Law) On Welfare Of Women Employees, Vol. V, Number 2*.
- Rufaidah Aslamiah, M. L. (2020). *Kejahatan Sunyi: Potret Pelecehan Seksual Buruh Perempuan*. Jurnal Sosiologi, hal. 54
- Sjahrir, S. (1982). *Sosialisme Indonesia, Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional.
- Tong, R. P. (1998). *Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis* (Terjemahan Aquarini Priyatna Prabasmoro ed.). Yogyakarta: Jalasutra.
- Udasmoro, W. (2004). *Konsep Nasionalisme dan Hak Reproduksi Perempuan: Analisis Gender Terhadap Program Keluarga Berencana*. Yogyakarta
- West, R., & Turner, L. H. (2010). *Introducing Communication Theory Analysis and Application (Fourth Edition)*. Singapore: Mc Graw-Hill International Edition.
- Wiratmoko, Dheny. (2014). *Globalisasi: Menindas dan Memiskinkan Masyarakat*. Jurnal Penelitian Pendidikan. 6(1). Hlm 931-936